

**KIPRAH NIHAYATUL WAFIROH DI MASYARAKAT
(STUDI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM BLOKAGUNG)**

Mariyam,¹ Ach Taufiqil Aziz²

UIN Sunan Ampel Surabaya Institut Sains dan Teknologi Annuqayah
Email: ¹mariyam.banyuwangi@gmail.com ²acikhamad447@gmail.com

Abstract

This article examines Nihayatul Wafiroh's leadership in society as a ning from the Blokagung Banyuwangi Islamic Boarding School as well as a leader in parliament. The researcher wants to find out the construction of Nihayatul Wafiroh's leadership and the impact of his leadership on society. This research uses a qualitative approach with a case study methodology. The theory used is the social construction of leadership and the theory of authority from Max Weber. The results of the study show that in terms of leadership construction, Nihayatul Wafiroh is formed with Islamic boarding school values in the form of simplicity, sincerity, and a spirit of service accompanied by the Aswaja way of thinking in the form of tawazun, taadul, tasammuh, and tawassuth. These values and ways of thinking then become his leadership model. In addition, by using Weber's theoretical framework on authority, the researcher found that when he was at the Nihayatul Wafiroh Islamic boarding school, he used charismatic authority. But when in parliament using legal authority. The impact of his leadership was received and felt by the students and the community and was also able to push political policies in parliament.

Keywords: *Nihayatul Wafiroh, Women's Leadership, Leadership Social Construction, Authority, Darussalam Blokagung Islamic Boarding School*

Abstrak

Artikel ini meneliti tentang kepemimpinan Nihayatul Wafiroh di Masyarakat sebagai seorang ning dari Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi sekaligus pimpinan di parlemen. Peneliti ingin menemukan konstruksi kepemimpinan Nihayatul Wafiroh dan dampak kepemimpinannya di Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Teori yang digunakan konstruksi sosial kepemimpinan dan teori otoritas dari Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstruksi kepemimpinan, Nihayatul

Wafiroh dibentuk dengan nilai pesantren berupa kesederhanaan, keikhlasan, dan spirit pengabdian disertai juga dengan cara berpikir Aswaja berupa tawazun, taadul, tasammuh, dan tawassuth. Nilai dan cara berpikir ini lalu di menjadi model kepemimpinannya. Selain itu, dengan menggunakan kerangka teoritik Weber tentang otoritas, peneliti menemukan bahwa pada saat berada di pesantren Nihayatul Wafiroh menggunakan otoritas kharisma. Namun saat di parlemen menggunakan otoritas legal. Dampak kepemimpinannya diterima dan dirasakan oleh santri dan masyarakat serta juga mampu mendorong kebijakan politik di parlemen.

Kata kunci : Nihayatul Wafiroh, Kepemimpinan Perempuan, Konstruksi Sosial Kepemimpinan, Otoritas, Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi.

A. Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan pesantren sebenarnya bukan hal yang baru di masyarakat. Hanya saja memang tampak tersembunyi dan tidak banyak yang mengungkapkannya secara lebih utuh dan komprehensif. Nihayatul Wafiroh diantara salah seorang perempuan dari pesantren yang kini sebagai pemimpin parlemen namun nyaris tidak pernah dikaji dengan serius secara akademik.

Meletakkan Nihayatul Wafiroh secara objektif dan kritis akan menjadi kajian yang cukup menarik diantara masih sepi nya kajian tentang kepemimpinan perempuan dalam dunia politik. Pada tahun 2002 Khofifah menulis tentang hambatan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Dalam narasi Khofifah, terdapat beberapa hal yang menjadikan karir politik perempuan terhambat. Yakni budaya patriarkhi yang kental, seleksi dari partai politik, media yang belum sepenuhnya mampu membangun opini publik mengenai representasi perempuan di parlemen dan belum adanya jaringan antar organisasi perempuan (Khafifah, 2002; 25)

Selain itu dapat dilihat pada rendahnya tingkat pendidikan, sulitnya mendapatkan izin dari pasangan untuk beraktivitas di luar rumah dan juga kegiatan di luar membutuhkan biaya yang besar daripada aktivitas perempuan yang dilekatkan pada wilayah domestik.

Analisa dari Khofifah Indar Parawansa tetap menemukan relevansinya. Dunia kepemimpinan Hingga kini kouta keterpilihan 30 persen perempuan tak pernah tercapai. Hasil pemilu tahun 2019 lalu tingkat keterpilihan perempuan

dalam pemilihan anggota legislatif hanya mencapai 20,7. (Iganitius Margono, 2010) Walaupun terus terjadi peningkatan, tetapi batas minimal partisipasi perempuan dalam dunia politik masih bagai panggang jauh dari api.

Padahal kalau mau jujur dengan data, sebenarnya pemilih perempuan di Indonesia lebih besar daripada laki - laki. Jumlah perempuan mencapai angka 96.557.044 pemilih. Lebih besar daripada jumlah pemilih laki - laki yang hanya 96.271.467 pemilih. Meski lebih besar, namun jumlah ini tidak menjadikan peran perempuan lebih besar daripada laki - laki. Keterwakilan perempuan masih cukup rendah daripada laki- laki.

Dengan segala problem tentang kepemimpinan perempuan yang masih rendah dan juga dominasi dari laki-laki sebagai pemimpin dalam agama, budaya dan politik, muncul sosok Niyatul Wafiroh, sosok perempuan yang lahir dari dunia pesantren dan kini aktif di parlemen.

Nihayah sebagai pimpinan di parlemen berbeda dengan kepemimpinan perempuan lainnya yang ada di Indonesia. Ia berbeda misalnya dengan kepemimpinan perempuan dalam medan perang seperti yang diperankan oleh Cut Nyak Dien dan Malahayati.

Nihayatul Wafiroh juga berbeda dengan Khofifah Indar Parawansa yang kini sebagai Gubernur Jawa Timur. Khofifah adalah pemimpin perempuan yang berada di jalur eksekutif dan Nihayatul Wafiroh berada di legislatif. Bedanya lagi dengan Khofifah, bahwa Nihayatul Wafiroh memiliki latar belakang pesantren di Blokagung dan Khofifah lebih dikenal sebagai Ketua Muslimat yang belum tergantikan hingga kini.

Perjalanan Nihayah sebagai perempuan pesantren dari Banyuwangi hingga kini berkarir sebagai pimpinan komisi di DPR RI menjadi suatu kaktater sendiri. Sosok Nihayatul Wafirah dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik lantaran suaranya yang keras dalam hal BPJS Kesehatan dan yang terakhir tentang Virus Corona.

Tidak hanya bersuara lantang sebagai pemimpin di Komisi IX kali ini. Ternyata Nihayatul Wafiroh memiliki prestasi yang diakui oleh publik. Hal ini misalnya pada tahun 2018 menjadi anggota Parlemen terbaik versi Panggung Indonesia.

Ada beberapa alasan Nihayatul Wafiroh menarik untuk diteliti. *Pertama*, bahwa Nihayatul Wafiroh merupakan salah satu *ning* di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. *Kedua*, Nihayatul Wafiroh adalah berangkat dari dapil Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Dapil ini berada di Tapal Kuda Jawa Timur. Memiliki karakter budaya tradisional yang cukup kental dengan patriarkhinya.

Ketiga, Nihayatul Wafiroh terpilih sebagai anggota parlemen dengan suara yang cukup besar. Pada pemilu tahun 2014 mendapatkan perolehan suara sebesar 90.169 suara. Sementara pada pemilu 2019 memperoleh suara 112.023 suara.

Padahal rival - rival pentingnya di internal partai terdapat nama seperti Nasyim Khan, ipar dari Kiai Kholil As'ad Syamsul Arifin di Situbondo dan juga berhasil mengalahkan suara dari Syukran Ma'mun, adik Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Keempat, Nihayatul Wafiroh terpilih dengan tanpa politik uang. Sebagaimana keterangan dari Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hamim, bahwa sosok Nihayatul Wafiroh menang tanpa dengan menggunakan politik uang untuk mempengaruhi masyarakat.

Beberapa alasan inilah yang membuat kami tertarik untuk meneliti tentang Kiprah Nihayatul Wafiroh di Masyarakat (Studi Kepemimpinan Perempuan Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi). Tulisan ini hendak menemukan bagaimana konstruksi kepemimpinan dan dampak kepemimpinan Nihayatul Wafiroh di masyarakat.

B. Landasan Teori

Artikel ini berlandaskan pada teori konstruksi sosial kepemimpinan dan teori otoritas dari Max Weber. Teori konstruksi sosial kepemimpinan secara sederhana hendak menyampaikan maksud bahwa dalam proses kepemimpinan terdapat proses konstruksi. Pemimpin bukan karena dilahirkan dan tidak natural. Tetapi pemimpin di konstruksi oleh lingkungan sosialnya untuk kemudian terbentuk dalam menjalani laku kepemimpinan.

Teori ini memiliki akar dan korelasi dengan teori interaksionisme dari George Mead, fenomenologi dari Schutz dan teori konstruksi sosial dari Peter L.

Berger dan Thomas Luckman. Kalau teori interaksionisme menitiktekan pada interaksi sosial, dan Berger memiliki pandangan tentang eksternalisasi, objektivikasi, dan juga internalisasi, maka konstruksionisme kepemimpinan lebih pada bagaimana lingkungan sosial yang memberikan sumbangsih terhadap kepemimpinan.

Di antara tokoh yang memiliki perspektif ini adalah Pfeffer, Smirchich dan Morgan. Di mana ia melihat bahwa kepemimpinan muncul dari tindakan atau respon atau juga konstruksi orang lain dalam organisasi. Ada proses kesinambungan secara sosial saat suatu individu dalam sistem melakukan tindakan kolektif. Disinilah sebenarnya proses kepemimpinan terbentuk.

Tokoh lainnya yang memiliki inisiasi terhadap konstruksi sosial adalah Keith Grint. Ia menganalisa bahwa ada dua dimensi antara orang dan situasi yang mengonstruksi kepemimpinan seseorang. Inilah yang membedakan ciri dan karakteristik kepemimpinan lain sebagaimana sifat dan kontingensi.

Dengan teori konstruksi sosial inilah, kami berupaya menganalisa kiprah Nihayatul Wafiroh di Masyarakat. Melihat dan mengenal tentang konstruksi kepemimpinan Nihayatul Wafiroh di Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi dan kini memiliki daya dorong untuk berkiprah di masyarakat.

Teori kedua adalah tentang otoritas. Max Weber (1864-1919), teoritikus yang mengembangkan teori tentang kharisma. Bagi Weber, ada tiga otoritas. Yakni otoritas legal, otoritas tradisional dan otoritas kharismatis. Untuk memudahkan, peneliti akan mencoba menguraikan tiga perbedaan otoritas dari Max Weber. Yakni otoritas karismatik, tradisional dan hukum-rasional. Pada jenisnya, model kepemimpinan karismatik mengandalkan karisma, sementara pada kepemimpinan tradisional menonjolkan kepribadian yang dominan. Sementara hukum rasional lebih bersifat fungsional.

Pada domain posisi bisa dilihat bahwa kepemimpinan karismatis memiliki ciri keperibadian yang dinamis, otoritas tradisional berdasarkan pada tradisi atau rutinitas yang mapan, sementara hukum-rasional setiap otoritas berdasarkan pada hukum yang ada.

Perbedaan lainnya dapat juga dilihat pada penggunaan perintah. Kepemimpinan karismatik menggunakan perintah yang berdasarkan pada kualitas

luar biasa dan kekuatan luar biasa yang terpusat pada sosok pemimpin, sementara otoritas tradisional berdasarkan pada warisan atau tradisi turun temurun yang dilakukan, sementara hukum-rasional disadarkan pada kebijakan, ketetapan, atau aturan regulasi yang dibuat oleh undang-undang.

Saat dihadapkan pada upaya dilegitimasi, pada otoritas karismatik ditentukan oleh kemenangan dan kesuksesan komunitas, pada otoritas tradisional ditentukan oleh rutinitas yang mapan dan pada hukum-rasional diletakkan pada keyakinan umum dan kebenaran formal yang dianggap sebagai otoritas yang sah.

Pada sisi loyalitas, kita dapat bedakan bahwa dalam otoritas karismatik adanya loyalitas pengabdian yang interpersonal dan pribadi dari pengikutnya dengan pemimpinnya. Sementara pada otoritas tradisional model loyalitasnya selalu didasarkan pada kesetiaan tradisional yang berlaku, dan pada otoritas hukum-rasional, kita melihat ada loyalitas terhadap aturan yang ada.

Pola hubungan yang ada dalam otoritas karismatik adalah hubungan yang dibangun secara emosional tidak stabil dan mudah berubah, pada otoritas tradisional lebih berdasarkan tujuan yang sama, dan pada hukum rasional terikat oleh dan untuk mematuhi aturan.

Pada wilayah model kepemimpinan, otoritas karismatik memiliki model relasi antara penguasa dan pengikut. Otoritas tradisional lebih pada perilaku sosial yang mapan dan tentu saja hukum-rasional didasarkan pada aturan yang ada. Bukan pada tokoh atau orangnya.

Secara lebih sederhana, contoh otoritas legal adalah pemerintah yang memiliki otoritas untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara otoritas tradisional adalah otoritas yang keabsahannya berasal dari adat istiadat. Di Indonesia sendiri, masih banyak masyarakat adat yang bertahan. Di Banyuwangi misalnya, tempat peneliti bermukim, terdapat masyarakat adat dari suku osing. Yakni komunitas masyarakat adat yang memiliki aturan sendiri dan pada sisi lain kepala suku memiliki otoritas terhadap adat di dalam didalamnya.

Dengan kerangka teoritik ini, kami hendak menganalisa kepemimpinan dari Nihayatul Wafiroh dalam konteks teori yang dijabarkan oleh Max Weber.

Penelitian ini ingin mengungkap sejauhmana tentang otoritas yang dimiliki oleh Nihayah dalam menjalankan kepemimpinannya.

Penelitian tentang kepemimpinan sebenarnya sudah banyak dilakukan. Antara lain Zamakhsyari Dhoefier misalnya menulis tentang “*Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*”, penerbit LP3ES, Jakarta (Zamakhsyari Dhoefier, 1994). Buku ini membahas tentang ciri-ciri umum pesantren, elemen-elemen sebuah pesantren seperti pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri dan kiai. Isinya memang tentang kepemimpinan. Tapi nyaris tidak ada bahasan tentang kepemimpinan perempuan.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Mastuhu yang berjudul tentang *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Walaupun penelitiannya juga dilakukan di Blokagung Banyuwangi, tetapi belum menyentuh tentang pola kepemimpinan perempuan. (Mastuhu, 1994)

Termasuk juga penelitian *Persepsi santri terhadap perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren: Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren Sidogiri–Pasuruan*, yang ditulis oleh Sugeng Hariyanto. Penelitian tersebut belum menyentuh terhadap perempuan pesantren. Baik itu ning, ibu Nyai, maupun santri putri. (Sugeng Hariyanto, 2012)

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif metode studi kasus. Kami menggunakan penelitian ini untuk melihat tentang konstruksi kepemimpinan, dan dampak kepemimpinan dari Nihayatul Wafiroh di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan dimulai pada April hingga Mei tahun 2020 yang bertempat di Banyuwangi.

Kami mengumpulkan data primer berupa observasi dan wawancara. Sebagai data primer, maka kami akan melakukan wawancara langsung dengan Nihayatul Wafiroh, Tim Nihayah Center, Keluarga di Pondok Pesantren Blokagung, perwakilan santri dan alumni di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.

Sedangkan data skunder adalah data penunjang yang berupa dokumentasi. Dokumentasi tersebut akan kami peroleh di Pesantren Darussalam Blokagung dan juga di tim Nihayah Center sebagai tim dari perjalanan Nihayatul Wafiroh sebagai anggota parlemen.

Data yang kami dapatkan dari hasil dari dokumentasi, observasi dan juga wawancara mendalam tersebut masih perlu kami olah lagi untuk kepentingan penulisan penelitian ini. Kami melakukan editing, organizing dan analiting. Setelah itu, kami mulai menuliskannya secara naratif deskriptif.

D. Hasil Penelitian

Nihayatul Wafiroh atau yang biasa akrab dimasyarakat dengan panggilan *Nduk Nik* lahir di Banyuwangi pada 15 Desember 1979. *Nduk Nik* merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi. Cucu pertama dari Kiai Mukhtar Syafaat, pendiri pondok pesantren di selatan Banyuwangi tersebut.

Sebagai cucu pertama dari Kiai Mukhtar Syafaat, ada suatu kisah yang cukup terkenal diperbincangkan di pesantren saat *Nduk Nik* kecil. Suatu waktu, saat masih taman kanak-kanak, *Nduk Nik* kecil tiba-tiba ikut tampil dalam pentas tari-tarian saat malam puncak haflatul imtihan. Tampilnya *Nduk Nik* diketahui oleh Kiai Mukhtar Syafaat.

Selama ini tidak ada santri perempuan yang berani untuk tampil di atas panggung di depan publik. Apalagi dengan menari-nari. Atas kejadian itu, masyarakat dan santri menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Karena ada anggapan dengan latar belakang keilmuan dan kentalnya pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh Kiai Mukhtar Syafaat, maka dugaan yang kuat, santri akan dimarahi oleh kiai.

Waktu demi waktu berlalu. Ternyata Kiai Mukhtar Syafaat kala itu malah tidak pernah memarahi santri atau menasehati santri tentang penampilan cucunya di pesantren. Suatu yang patut dicatat, bahwa diamnya kiai berarti ke arah setuju terhadap tindakan yang dilakukan. Artinya hanya Nihayatul Wafiroh yang berhasil membuat Kiai Mukhtar Syafaat tidak jadi marah.

Selain pendidikan langsung dari keluarganya, Nihayatul Wafiroh tercatat juga menempuh jalur pendidikan formal pada umumnya. Ia mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar Blokagung. Lalu pada tahun 1994 menempuh pendidikan di

Madrasah Tsanawiyah al Amiriyah Blokagung Banyuwangi, lalu melanjutkan ke jenjang Muallimin Muallimat Atas (MMA) di Pondok Pesantren Tambak Beras Tambakrejo Jombang sejak tahun 1994. Dalam catatan di website resmi DPR RI, Nihayatul Wafiroh melanjutkan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas nya di MA Al Amiriyah sejak 1994-1997.

Yang menarik, Nihayatul Wafiroh melanjutkan jenjang kuliahnya Strata I di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta dan lulus pada tahun 2004 dengan predikat Cumlaude. Sempat meneruskan S2 di Universitas Jember pada tahun 2004 tapi tidak lulus.

Kesempatan untuk kuliah S2 ternyata didapatkan oleh Nihayatul Wafiroh dengan mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat. Nihayatul Wafiroh S2 di Amerika sejak tahun 2007-2009 di Universitas Hawaii. Ia juga melanjutkan program Doktoratnya di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2009-2016.

Selain menempa diri dalam dunia akademik, Nihayatul Wafiroh adalah aktivis yang bergelut dalam sejumlah organisasi. Ia kerap menyuarakan kepentingan dan pembelaan terhadap kelompok perempuan, buruh migran, dan juga kepentingan lingkungan.

Nihayah aktif di Fatayat NU sejak di Kecamatan Tegalsari, Fatayat NU Yogyakarta, sampai menjadi bagian dari Pengurus Pusat Fatayat NU. Organisasi perempuan ini merupakan salah satu badan otonom yang berada di bawah Nahdhatul Ulama.

Di organisasi tentang perempuan juga, Nihayatul Wafiroh pernah aktif di Forum Seksualitas Indonesia (FSI), lalu di Puan Amal Hayati sebagai sekretaris sejak tahun 2003-2005. Ia bertanggung jawab untuk wilayah Situbondo, Jember, Banyuwangi dan Probolinggo.

Sebagai aktivis yang menyuarakan kepentingan perempuan, saat peneliti ke kediamannya, ia juga mengaku sebagai inisiator dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Selain itu, Nihayatul Wafiroh juga aktif di Organisasi Handicap Nusantara sebagai founder sejak tahun 2012. Sebelumnya ia juga aktif di Indonesia Social Justice Network (ISJN) sebagai sekretaris sejak tahun 2011.

Dalam rangka mendorong semangat literasi, Nihayatul Wafiroh setidaknya aktif di *Baca Yuk Movement* sebagai sekretaris sejak tahun 2003 sampai 2005. Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Nihayatul Wafiroh juga pendiri dari *Community Library*. Membaca dan menulis adalah bagian perjalanan penting dari sosok Nihayatul Wafiroh. Itu bisa terlihat dari sejumlah karya yang dihasilkan dan terbit di sejumlah media. Baik itu yang bersifat jurnal ilmiah maupun juga di media koran.

Selain organisasi sosial yang digeluti tentu saja Nihayatul Wafiroh juga bergelut di organisasi politik. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang telah mengantarkannya sebagai anggota parlemen. Di PKB, posisi Nihayatul Wafiroh sebagai Wakil Sekretaris Jenderal sejak tahun 2014-2019. Ia juga menjadi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di DPP Perempuan Bangsa pada periode yang sama.

Perempuan Bangsa merupakan sayap organisasi keperempuanan dari PKB yang memang khusus menampung aktivis perempuan yang ada di partai ini. Posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal adalah capaian penting tersendiri untuk Nihayatul Wafiroh. Tentu fakta yang tak bisa ditolak adalah adanya kedekatan antara Cak Imin sebagai Ketua Umum Partai dengan dengannya.

Yang patut dicatat juga di PKB, Nihayatul Wafiroh pernah masuk dalam Komandan Satuan Tugas TKI PKB pada 2017. Pada masalah TKI dan buruh migran yang ada di luar negeri, sosok Nihayatul Wafiroh tentu saja memiliki jejak penting yang nantinya akan diulas lebih detail dibagian selanjutnya.

Sejak tahun 2014- hingga sekarang Nihayatul Wafiroh menjadi anggota parlemen. Mulai dari anggota DPR RI biasa, hingga dipercaya sebagai Wakil Pimpinan Komisi II dan sekarang di Komisi IX.

E. Pembahasan

1. Konstruksi Kepemimpinan Nihayatul Wafiroh

Basis sosial dari Nihayatul Wafiroh adalah pondok pesantren. Ia lahir, tumbuh, berkembang, dan hingga kini berada di pesantren. Asep Kurniawan menyebut sejumlah nilai di pesantren, yakni keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, dan kebebasan. Yang dimaksud dengan

keikhlasan adalah bahwa setiap laku dan nilai seorang santri diharapkan hanya untuk mencari ridha dari Allah swt. (Asep Kurniawan, 2020; 11)

Perihal keikhlasan ini sebenarnya menjadi ciri utama yang terkenal dari pesantren yang ada di Indonesia. Seorang kiai yang mendirikan pesantren biasanya berangkat dari keinginan perjuangan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Tidak pernah ada suatu pesantren yang hanya demi kepentingan duniawi.

Kiai Mukhtar Syafaat misalnya sebagai pendiri dari Pesantren Darussalam dikenal oleh masyarakat sebagai Al-Ghazalinya pulau jawa. Karena laku hidup yang diperankan olehnya sebagai gambaran kitab Ihya' Ulumuddin berjalan. Jika santri ingin mengetahui tentang isi kitab Ihya' Ulumuddin, maka dapat melihat sikap dan karakter dari Kiai Mukhtar Syafaat.

Nilai lain di pesantren adalah kesederhanaan. Tidak berlebih-lebihan dalam hidup, mulai dari makan, minum, dan berpakaian. Nilai ini ditekankan betul dalam setiap pesantren di Indonesia. Nilai selanjutnya di pesantren adalah kemandirian. Bahwa pesantren adalah lembaga yang mandiri sejak berdirinya. Tidak tergantung pada bantuan pemerintah atau dari pemodal asing. Ada pesantren yang awalnya berdiri dari kandang kuda lalu membesar menjadi suatu pesantren besar. Ada pula dari pedukuhan kecil tempat ngaji di surau lalu kini memiliki ribuan santri. Karakter kemandirian inilah yang juga menjadi nilai dari pesantren.

Selain itu juga ada nilai *ukhuwah islamiyah*. Bahwa nilai persaudaraan seagama menjadi nilai yang terus dikembangkan oleh pesantren. Santri juga diharapkan dapat memiliki nilai persaudaraan sebagai sesama muslim.

Nilai selanjutnya adalah kebebasan. Seorang santri berhak menentukan dirinya sendiri terhadap masa depannya. Seorang santri tidak hanya diproduksi dan diarahkan untuk menjadi kiai semata. Bahkan seorang santri bisa menjadi pengusaha, petani, pejabat pemerintah, bahkan sebagai presiden dan wakil presiden.

Nihayatul Wafiroh tumbuh dan besar dalam lingkungan dengan sejumlah nilai tersebut. Bagaimanapun juga nilai-nilai itu turut membentuk karakter dirinya sebagai pimpinan di parlemen. Ia mengaku bahwa dunia politik adalah jalan pengabdian.

Pengabdian adalah kosa kata yang barangkali memang sering diungkapkan oleh politisi. Namun sebenarnya pernyataan Nihayatul Wafiroh tampaknya perlu diuji dan didalami lebih jauh. Ia adalah perempuan yang tidak bisa disederhanakan dengan suatu pemikiran saja. Karena pemikirannya berserak. Kita mengenalnya konsern dalam pembelaan terhadap isu-isu perempuan. Pada sisi lain juga memiliki rekam jejak dalam mengawal buruh migran sejak dalam wilayah memberikan keterampilan, pengawalan dalam regulasi, sampai juga saat terdapat masalah-masalah lainnya yang dihadapi oleh buruh migran.

Pada sisi lainnya, Nihayatul Wafiroh tampak juga berbicara keras dalam konteks kesehatan, anggaran, pandemi covid, dan BPJS. Ia selalu lantang menyuarakan kepentingannya dalam memperjuangkan masyarakat kecil. Inilah yang membuat bahwa membaca Nihayatul Wafirah spektrumnya tambah luas.

Namun dengan karakternya ini kita bisa melihat bahwa Nihayatul Wafiroh setidaknya berjuang dalam kerangka nilai pesantren sebagaimana yang juga menjadi kerangka dari *Ahlusunnah Wal Jamaah*. Yakni sebenarnya bentuk pemikirannya ini merupakan bagian dari kerangka pikir dari Aswaja sebagai Manhajul Fikr. Yakni meliputi ta'adul (keadilan), tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), dan juga tasammuh (toleran).

Adalah Prof Said Aqil Siradj yang memulai memunculkan diskursus bahwa Aswaja sebagai kerangka berpikir atau manhajul fikr setelah sebelumnya hanya dijadikan sebagai basis dari teologi semata. Sebagai cara berpikir, maka tentu saja akan melahirkan bentuk dan produk pemikiran yang berbeda-beda dengan tetap sesuai dengan 4 prinsip tersebut. (Said Aqil Siradj, 1998; 10)

Dengan menggunakan 4 prinsip tersebut, maka Nihayatul Wafiroh secara lihai dapat melakukan fungsinya sebagai pimpinan di parlemen untuk mengawasi jalannya pemerintahan sesuai dengan bidang dan mitra kerjanya.

Ketika Nihayatul Wafiroh menyampaikan argumentasi tentang perlunya mitigasi dini pemerintah dalam pencegahan Corona, maka pada saat tersebut, Nihayatul Wafiroh sedang berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai aswaja sebagai metodologi berpikir dan cara pandang melihat persoalan.

Pun demikian saat membela TKI yang ada di luar negeri, pada sisi lain sebenarnya berakar dari nilai Aswaja sebagai spirit bertindak. Ia ingin

menghadirkan prinsip *ta'adul* atau keadilan bagi masyarakat. Mereka yang mustad'afin harus dibela harkat dan martabatnya sesuai dengan spirit agama.

Pun juga saat mengomentari tentang BPJS, maka Nihayatul Wafiroh sebenarnya juga ingin agar masyarakat yang tidak mampu juga berhak untuk dilayani oleh negara. Bahwa pada hekekatnya negara harus hadir untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakatnya sebagaimana prinsip qaidah fikih *tashorroful iman, manutun bil mashlahah*.

2. Otoritas Nihayatul Wafiroh

Adalah Max Weber (1864-1919), teoritikus yang mengembangkan teori tentang otoritas. Menurut Weber, ada tiga otoritas. Yakni otoritas legal, otoritas tradisional dan otoritas kharismatis (Weber; 1964; 244).

Kepemimpinan karismatik mengandalkan karisma. Kepemimpinan tradisional menonjolkan kepribadian yang dominan. Sementara hukum rasional lebih ciri fungsional yang kini juga diselenggarakan oleh pejabat birokrasi.

Jika dikontekstualisasikan pada sosok Nihayatul Wafiroh, sebenarnya model kepemimpinan dari Nihayatul Wafiroh tampaknya tidak bisa dibaca tunggal. Karena ia mampu dan berhasil beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika berada di pesantren, maka model yang digunakan adalah kharisma. Saat sebagai pimpinan di parlemen, model yang digunakannya adalah legal rasional.

Berhadapan dengan lingkungan pesantren saat otoritas berada di tangan kiai dan keluarganya, maka Nihayatul Wafiroh memiliki ciri dan karakter dengan menggunakan otoritas karisma. Di parlemen yang memungkinkan suasana demokratis dan silang pendapat, maka pada sisi ini sebenarnya telah mempraktekkan legal rasional.

Ciri lainnya pada domain posisi bisa dilihat bahwa kepemimpinan karismatis memiliki ciri keperibadian yang dinamis, otoritas tradisional memiliki tradisi atau rutinitas yang mapan, sementara hukum-rasional setiap otoritas berdasarkan pada hukum yang ada.

Kontekstalisasi pada ciri ini bisa kita lihat bahwa sosok Nihayatul Wafiroh memang tampak dinamis dalam berinteraksi. Media sosial yang dikelolanya meliputi Facecook, Instagram dan Twitter, kita bisa melihat bahwa

Nihayatul Wafiroh menampilkan peran sebagai sosok yang selalu ceria, kritis dan bebas. Ia tampak tidak terikat oleh tradisi mapan sebagai ciri dari otoritas tradisional. Nihayah pada sisi ini memerankan dan memainkan laku yang menonjol dalam otoritas karisma.

Perbedaan lainnya dapat juga dilihat pada penggunaan perintah. Kepemimpinan karismatik menggunakan perintah yang berdasarkan pada kualitas dan kekuatan luar biasa yang terpusat pada sosok pemimpin. Sementara otoritas tradisional berdasarkan pada warisan atau tradisi turun temurun yang dilakukan, sementara hukum-rasional disadarkan pada kebijakan, ketetapan, atau aturan regulasi yang dibuat oleh undang-undang.

Daya perintah yang dilakukan oleh Nihayatul Wafiroh memiliki skala yang juga tidak bisa disama-ratakan. Bahwa ketika menjadi pimpinan parlemen, Nihayatul Wafiroh memiliki kekuatan undang-undang untuk melakukan kerja pengawasan, penganggaran sampai dengan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap stakeholder yang lainnya. Artinya otoritas legal rasional dominan pada sosok Nihayatul Wafiroh.

Pada sisi loyalitas, kita dapat bedakan bahwa dalam otoritas karismatik adanya loyalitas pengabdian yang interpersonal dan pribadi dari pengikutnya dengan pimpinannya. Sementara pada otoritas tradisional model loyalitasnya selalu didasarkan pada kesetiaan tradisional yang berlaku, dan pada otoritas hukum-rasional, kita melihat ada loyalitas terhadap aturan yang ada.

Pada sisi ini sebenarnya sosok Nihayatul Wafiroh sebagai pemimpin di parlemen tidak hanya bisa dibaca dalam kerangka kerja-kerja di Senayan. Tetapi juga perlu dilihat pada loyalitas pemilihnya di Dapil Jawa Timur III yang meliputi Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso. Fakta bahwa Nihayatul Wafiroh tidak menggunakan politik uang untuk tingkat keterpilihannya sebagai anggota parlemen dapat disimpulkan bahwa ia memiliki tingkat keterpengaruhan yang tinggi berkaitan dengan otoritas karisma yang dimilikinya. Bahkan Nihayatul Wafiroh memiliki barisan Nduk Nik Militan. Yakni suatu komunitas yang berasal dari pemilih Nihayatul Wafiroh di tiga kabupaten tersebut.

Nduk Nik Militan sebagai komunitas tidak hanya melakukan kerja saat ada pemilihan saja. Tetapi juga melakukan kerja lain sebagai tangan kanan dari

Nihayatul Wafiroh untuk dekat dengan masyarakat. Misalkan saat Idul Adha membagikan puluhan kambing yang tersebar di berbagai titik di Banyuwangi.

Pola hubungan yang ada dalam otoritas karismatik adalah hubungan yang dibangun secara emosional tidak stabil dan mudah berubah, pada otoritas tradisional lebih berdasarkan tujuan yang sama, dan pada hukum rasional terikat oleh dan untuk mematuhi aturan.

Dalam kasus Nihayatul Wafiroh kita melihat bahwa dari nama pengikutnya Nduk Nik Militan. Artinya dapat dilihat tentang tingkat hubungan emosional antara sosok Nihayatul Wafiroh dengan pemilihnya. Ikatan mereka tidak lagi berdasarkan relasi rasional dan juga aturan tertulis, tetapi pada bentuk perasaan atau emosional antara Nihayatul Wafiroh dengan pemilihnya.

Pada wilayah model kepemimpinan, otoritas karismatik memiliki model relasi antara penguasa dan pengikut. Otoritas tradisional lebih pada perilaku sosial yang mapan dan tentu saja hukum-rasional didasarkan pada aturan yang ada. Bukan pada tokoh atau orangnya.

Inilah tampaknya juga bisa kita kontekstualisasikan dalam perjalanan Nihayatul Wafiroh sebagai pimpinan di parlemen. Selain memiliki barisan Nduk Nik Militan, harus diakui juga ada variabel pesantren sebagai lembaga keagamaan dengan menampung ribuan santri yang tersebar di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan daerah lainnya se-Indonesia. Keberadaan Nihayatul Wafiroh sebagai ning di pesantren memiliki pengaruh terhadap politik elektoral.

Kita tahu bahwa dalam politik elektoral dan tingkat keterpilihan sebagai anggota legislatif bergantung pada suara yang diperoleh. Satu suara sangat berarti terhadap tingkat keterpilihan seseorang. Jumlah santri juga memiliki hubungan dengan suara saat berkontestasi.

Nihayatul Wafiroh harus diakui memiliki modal yang mirip dengan Gus Dur. Walau tentu saja tingkat kharismanya berbeda. Gus Dur dilahirkan dari keluarga Nahdlatul Ulama. Kakeknya adalah pendiri dari NU, ayahnya adalah mantan menteri agama. Keluarganya berasal dari jalur pesantren besar di Tebuireng dan Denanyar, dua pesantren yang memiliki pengaruh besar dalam konstelasi politik di Indonesia.

Bedanya adalah Nihayatul Wafiroh dilahirkan dan besar di lingkungan Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi. Berkah otoritas kharisma yang dimiliki oleh Nihayatul Wafiroh patut diakui memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap perjalanan Nihayatul Wafiroh

Otoritas kharisma inilah yang lalu dapat dikapitalisasi demi kepentingan politik elektoral untuk mendapatkan suara. Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rozaki menunjukkan bahwa tingkat keterpengaruhan kiai di pesantren yang kuat dijadikan cara untuk menebar kharisma dan meraih kuasa dalam politik elektoral. (Rozaki, 2004)

Namun demikian, secara gender Nihayah adalah perempuan. Harus diakui. di pesantren pengaruh kharisma yang dimiliki oleh laki laki dan perempuan berbeda. Tidak hanya dalam konteks yang luas dalam politik praktis, dalam ritualitas keagamaan misalnya, jika ada laki laki dan perempuan dalam satu tempat, maka aktor utama dalam ritualitas keagamaan adalah laki laki. Sementara kelompok perempuan dipinggirkan ke dapur dan menyiapkan segala ritual untuk laki laki.

Untuk itulah, patut dihadirkan suatu analisa seberapa besar pengaruh kultur laki laki di Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi dalam memperlakukan perempuan dan laki laki. Pada posisi ini, kita melihat bahwa Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi masih termasuk yang memisah antara laki laki dan perempuan dalam jenjang pendidikannya dan asramanya.

Yang menarik, bahwa santri yang telah menjadi mahasiswa akan digabung dengan mahasiswi lainnya dalam suatu forum. Ini tentu menjadi salah satu penanda akan adanya keterbukaan dari pondok pesantren ini dalam konteks pembelajaran antara laki laki dan perempuan di dunia kampus.

Nihayatul Wafiroh menyampaikan bahwa sebenarnya di keluarganya tidak ada pembedaan gender untuk bisa mengabdikan di masyarakat. Keterbukaan ini menjadi indikasi bahwa Nihayatul Wafiroh sebenarnya memiliki kebebasan secara tradisi pesantren untuk tampil dalam ruang publik yang lebih besar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nihayatul Wafiroh sendiri bahwa perjuangan itu tidak hanya di pesantren saja, tetapi juga ada ruang yang lebih luas. Salah satunya adalah di parlemen.

3. Dampak Sosiologis Kiprah Nihayatul Wafiroh

Keberadaan Nihayatul Wafiroh memiliki dampak yang berarti bagi masyarakat. Salah satu indikator dari dampak itu misalnya bisa kita lihat dari tingkat keterpilihan Nihayatul Wafiroh untuk berkontestasi sebagai anggota legislatif pada tahun 2019.

Masyarakat yang merasa diperjuangkan oleh Nihayatul Wafiroh tentu saja akan kembali memilihnya. Dugaan ini diperkuat sekali lagi dengan tidak menggunakan politik uang. Tentu saja daya tariknya adalah jejak dan kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat akan membuatnya kembali terpilih sebagai anggota parlemen. Nihayatul Wafiroh berhasil membuktikannya.

Ketika peneliti melakukan wawancara, Nihayatul Wafiroh menyampaikan bahwa politik yang dilakukannya sebagai jalan untuk pengabdian secara lebih luas. Karena untuk pengabdian, maka dibutuhkan perjuangan untuk menggapainya. Kalau niatnya baik untuk mengabdikan, maka tidak boleh dilakukan dengan cara yang kotor. Cara kotor yang dimaksud salah satunya dengan menggunakan politik uang.

Bagi Nihayatul Wafiroh, ketika sudah menjadi anggota parlemen, maka dirinya tidak lagi hanya mewakili dapilnya saja, tetapi juga mewakili penduduk Indonesia.

Peneliti lalu berusaha untuk menggali lebih jauh terhadap respon masyarakat tentang dampak kepemimpinan dari Nihayatul Wafiroh. Baik itu pengalamannya saat masih jadi pimpinan di Komisi II maupun sebagai pimpinan di Komisi IX.

Ketua Bawaslu Banyuwangi mengungkapkan bahwa Nihayatul Wafiroh memiliki kontribusi penting terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia. Ia salah satu perempuan yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Soal yang hangat tentang Corona misalnya, Nihayatul Wafiroh pada awal bulan maret 2020 telah mengingatkan pemerintah untuk lebih waspada terhadap virus ini. Pun demikian juga mengingatkan masyarakat yang ada di Indonesia.

Masalahnya singgungan Nihayatul Wafiroh dengan virus dari Wuhan ini tidak hanya sebatas dalam meja diskusi, tetapi ia juga menjadi salah satu panglima yang berada di garda depan manakala Pondok Pesantren Blokagung terdapat

santri yang terkena Covid-19. Nihayatul Wafiroh menjadi juru bicara resmi pondok pesantren yang memberitakan kepada publik tentang kondisi pondok pesantren, santri yang terpapar dengan virus Covid-19.

Selama 14 hari karantina, Nihayatul Wafiroh harus memimpin pasukan dari berbagai elemen untuk memberikan makan kepada 6 ribu santri yang ada di pondoknya, 3 kali sehari dalam 14 hari. Nihayatul Wafiroh berhasil tampil optimis dan hal itu dirasakan betul oleh masyarakat.

Puri, sebagai salah satu tetangga dari pondok pesantren Blokagung mengungkapkan bahwa Nihayatul Wafiroh memiliki peran signifikan yang membuat situasi Covid-19 menjadi terkendali.

Menurut Puri, bahwa stigma buruk terhadap penderita covid-19 di Blokagung sudah cukup berat memprihatinkan. Karena menurutnya, orang orang yang KTPnya berasal dari daerah ini akan diasingkan dan dijauhi oleh penduduk di luar Blokagung. Bahkan yang membuat miris kata Puri, adalah ada salah satu kecamatan yang menyebarkan himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan lantaran ada santri blokagung yang pulang kampung pasca karantina selama 14 hari.

Menjadi pemimpin, Nihayatul Wafiroh memiliki modal dan model. Ia menggunakan otoritas kharismanya pada relasi sebagai ning dengan santri. Tetapi ia pemimpin yang tangguh dengan legal rasional saat sebagai pimpinan di parlemen. Singa perempuan dari Banyuwangi.

E. Kesimpulan

Dari seluruh ulasan, peneliti dapat menyimpulkan, *pertama*, Konstruksi kepemimpinan dari Nihayatul Wafiroh berakar dari proses di pesantren, bersinggungan dengan aktivis, akademisi dan politisi lintas sektoral yang membentuk dirinya hari ini. Proses di pesantren telah mengonstruksi pemikirannya untuk menggunakan kepemimpinan kharismatik. Tetapi singgungannya dengan politisi dan dunia parlemen telah membentuk kepemimpinan rasional. Yang menarik dua otoritas ini dijalankan dalam waktu bersamaan. Ia menggunakan otoritas kharisma saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada tahun 2014 dan tahun 2019, dan ketika sudah masuk di

dunia parlemen, ia menggunakan otoritas legal rasional untuk menjalankan kepemimpinannya.

Kedua, Nihayatul Wafiroh sebagai anggota parlemen memiliki dampak penting secara sosialogis kepada masyarakat yang ada di Banyuwangi. Dampak itu setidaknya bisa diidentifikasi pada sumbangsih Nihayatul Wafiroh dalam mengayakan demokrasi tanpa politik uang dan juga pembelaannya yang konsisten terhadap buruh migran dan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Nihayatul Wafirah tidak hanya mengawal kalau ada masalah, tetapi juga berperan dalam memberikan keterampilan terhadap buruh migran di Banyuwangi. Yang jelas juga Nihayatul Wafiroh tidak hanya menyuarakan tentang Covid-19 di parlemen saja, tetapi juga menjadi panglima yang berada di garda depan saat Pondok Pesantren Blokagung terdapat santri yang terpapar Covid-19. Nihayatul Wafiroh menjadi juru bicara resmi pesantren.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. 1999. “*Agama, Kebenaran dan Relativitas*”, dalam pengantar Gregory Baum, *Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme*, terj. Achmad Murtajb Chaeri dan Masyhuri Arow. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bahar. Ahmad. *Biografi politik Megawati Soekarnoputri*. Jakarta: UI.
- Bahtiar, Wardi. 1990. *Perkembangan Pesantren di Jawa Barat*. Bandung; Balai Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati.
- Baum, Gregory. 1999. *Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis - Normatif*, terj. Achmad Murtajb Chaeri dan Masyhuri Arow. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bungin, Burhan. 2008. *Buku Sosiologi Komunikasi; Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 2012. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup* Jakarta: LP3ES.

- Dofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3S.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Gulo, W.. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Grasindo.
- Hariyanto, Sugeng. 2012. *Persepsi santri terhadap perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren: Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren Sidogiri–Pasuruan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Harianto, Budi. *Relasi Teologi Aswaja dengan HAM Perspektif Kiai Said Aqil Siradj* yang dimuat di <https://core.ac.uk/download/pdf/288101296.pdf> diakses pada 10 September 2020.
- Kartono, Kartini. 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Khafifah, *Hambatan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. 2002.
- Kuniawan, Asep. *Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren dalam Menjawab Krisis Sosial*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Koentjoro. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Luckman, Peter L. Berger dan Thomas. 1990. *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Margono, Ignatius. 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Politik*.
- Moenandir, Jody. 2010. *Filosofi, Metode Penelitian dan Komunikasi Ilmiah* Malang: UB Pers.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rosdakarya.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2020 *Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. Jakarta: KPG.

- Polomo, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, terj. Aliman Jakarta: Kencana.
- Rozaki, Abdur. 2004. *Menabur Karisma, Menuai Kuasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Siradj, Said Aqil. 1998. *Ahlusunnah Wal Jamah dalam Lintasan Sejarah* Yogyakarta; LKPSM.
- Sugito, Yogi. 2013. *Metodologi Penelitian, Metode Percobaan dan Penelitian Karya Ilmiah* Malang : UB Press.
- Syafiq, Hasyim. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: TAF Indonesia.
- Syihab, M. Quraish. 2007. *Perempuan*. Jakarta; Penerbit Lentera Hati.
- Toer, Pramodiya Ananta, *Panggil Aku Kartini Saja*. Penerbit: Lentera.
- Warits, Abd. 2010. “*Menggugat Tafsir Patriarkhi: Upaya Membebaskan Perempuan dalam Diskriminasi (Tela’ah pada kehidupan perempuan di Madura)*”. *Kajian Islam Multidisipliner* (jilid 3). Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Free Press.